



INNOVATION IN PUBLIC SERVICE: WHAT'S NEXT?

Inovasi pelayanan publik di Indonesia telah tumbuh dengan pesat. Paling tidak terdapat tiga faktor yang mendorong keberhasilan tersebut. Pertama, setiap pimpinan lembaga di dorong menghasilkan inovasi sebagai standar kompetensi kepemimpinan. Kedua, pendirian laboratorium inovasi daerah yang telah mendorong munculnya ide-ide inovatif. Ketiga, adanya kompetisi untuk pemilihan inovasi-inovasi di sektor pemerintah. Ketiga faktor tersebut mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan inovasi terbaik bagi daerahnya.

Pertumbuhan inovasi yang begitu pesat bukan tidak terlepas dari beberapa permasalahan baru. Banyak inovasi yang dihasilkan hanya mampu bertahan dalam jangka pendek. Target yang telah ditetapkan tidak mampu dicapai dengan maksimal pada jangka menengah dan bahkan terhenti pada jangka panjang. Di era desentralisasi sekarang ini inisiatif dan tuntutan untuk melakukan inovasi antar satu daerah dengan daerah yang lainpun sangat timpang, selain faktor kepemimpinan juga dipengaruhi oleh tidak adanya instrumen dimasing-masing sektoral yang efektif secara nasional untuk mengaplikasikan dan mereplikasikan berbagai inovasi yg sudah baik ditingkat nasional atau di suatu daerah tertentu.

Selain itu, pemanfaatan beberapa inovasi juga rendah bahkan cenderung ditinggalkan. Beberapa inovator memberikan alasan klasik seperti kurangnya dukungan kebijakan dan pendanaan. Selain itu, munculnya inovasi baru yang lebih baik menyebabkan inovasi tersebut ditinggalkan masyarakat atau terhenti dengan sendirinya.

Peningkatan jumlah inovasi yang ditinggalkan juga memberi dampak buruk bagi semangat berinovasi di kalangan instansi publik. Inovasi sejauh ini sepertinya sebagai kebutuhan personal sang inovator bukan didorong dari kebutuhan organisasi. Akibatnya, inovasi tidak didukung oleh seluruh lapisan di sebuah organisasi pemerintah. Selain itu, masyarakat juga mulai mempertanyakan kualitas inovasi di sektor publik. Beberapa aplikasi pemerintah yang merupakan wujud inovasi mulai dipertanyakan oleh masyarakat sebagai pemborosan karena manfaatnya tidak begitu dirasakan. Apalagi jika inovasi tersebut terhenti sebelum memberi dampak positif yang besar bagi masyarakat.

Akibatnya, terjadi peningkatan pemborosan sumber daya pemerintah dengan adanya inovasi yang terhenti.

Fenomena tersebut telah diprediksi oleh para pakar bahwa inovasi di pemerintahan dapat tumbuh dengan begitu cepat tetapi memiliki efektivitas yang rendah. Salah satunya penyebabnya adalah belum tersedianya instrumen yang dapat mengukur efektivitas sebuah inovasi pelayanan publik. Selain itu, pengukuran yang tersedia baru bersifat mikro yaitu mengukur kepuasan terhadap pemanfaatan inovasi. Belum tersedianya instrumen yang mampu mengukur manfaat inovasi secara luas menyebabkan rendahnya kualitas perencanaan inovasi pemerintahan. Inovator kurang memerhatikan kesinambungan inovasi, hanya menekankan pembangunan inovasi. Akibatnya, inovasi hanya mampu bertahan dalam jangka pendek dan terhenti untuk keberlanjutannya di jangka panjang.

Selain kebutuhan akan instrumen pengukuran, inovasi pelayanan publik di Indonesia juga masih sangat sangat minim didukung oleh penelitian akademik. Kendatipun pemerintah juga telah berupaya mendorong implementasi inovasi disektor publik melalui berbagai kebijakan misalnya dengan menjadikan Inovasi Daerah sebagai salah satu Bab tersendiri dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kelihatannya inovasi masih belum menjadi isu yang menarik bagi peneliti di bidang administrasi negara. Atau, inovasi belum memberi ruang yang jelas untuk dilakukannya sebuah penelitian akademis. Padahal, pengembangan inovasi tidak dapat dipisahkan dari penelitian. Penelitian dapat membantu inovator untuk menghasilkan inovasi yang lebih *sustainable* dan *resistant* terhadap perubahan-perubahan yang ada. Sektor swasta telah membuktikan, inovasi harus dimulai dari sebuah penelitian yang komprehensif jika ingin memenangkan persaingan pasar.

Kalaupun kita menemukan beberapa daerah dan institusi yang sukses dengan berbagai inovasinya seperti Kota Surabaya, Kabupaten Bantaeng, Kota Bandung, PJKa dan beberapa daerah dan institusi lain, hal tersebut lebih banyak di pengaruhi oleh faktor kepemimpinan. Oleh karenanya upaya untuk menumbuh kembangkan Inovasi secara lebih luas di seluruh level dan sektor pemerintahan baik di pusat maupun di daerah masih membutuhkan upaya dan pendekatan yang lebih strategis dan masif tidak hanya mengandalkan faktor individu (inovator) semata.

Said Fadhil